

**PERAN PEGAWAI DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN  
BINAMU KABUPATEN JENEPONTO**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial  
Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial  
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**KASMIATI**

50600111016

**JURUSAN PMI KONSENTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasmianti

NIM : 50600111016

Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto, 28 Oktober 1993

Jurusan : PMI/Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Jln. Pettarani Ilc

Judul Skripsi : **Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kekerasan  
dalam Rumah Tangga di Kecamatan Binamu  
Kabupaten Jeneponto**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Maret 2016

Penyusun

**KASMIATI**  
NIM: 50600111016

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ **Peran Pegawai Dinas Sosial dalam Penanggulangan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto**” yang disusun oleh **Kasmiati**, NIM: **50600111016**, mahasiswa Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UTN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 maret 2016 M, bertepatan dengan 19 Jumadil 1437, di nyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalal Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 29 Maret 2016  
19 Jumadil 1437

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Misbahuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Suharyadi, S.HI	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Syamsuddin. AB, S.Ag., M.P	(.....)
Munaqisy II	: Dra. St. Aisyah. BM., M.Sos.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I	(.....)
Pembimbing II	: Nuryadi Kadir, S.Sos., M.A	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar

Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M  
NIP. 19690827 199603 1 004

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”**. Tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, serta doa tercurah kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau

Penyusunan skripsi ini merupakan rangkaian sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Serjana sosial serta menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan-masukan, kritikan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, ayahanda **Zainuddin** dan Ibunda **St. Aminah** sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidupku menggapai cita, sembah sujud yang sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang memberikan dukungan, motivasi serta restu mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu serta memberikan support sehingga tugas akhir ini dapat terlaksana. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas.
2. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S. Ag., M. Pd., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Wakil Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya atas kepemimpinan dan pelayanannya selama penulis belajar di fakultas ini mulai dari awal sampai akhir.
3. Ibu Dra. Aisyah BM, M. Sos. I selaku Ketua Jurusan PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial yang tulus memberikan arahan, motivasi, nasehat, serta bimbingan selama penulis menempuh proses perkuliahan pada jurusan PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial.
4. Bapak Dr. Syamsuddin AB., M.Pd. Selaku Sekretaris Jurusan PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan perhatian dan arahan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nur Syamsiah, M. Pd. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dari persiapan proposal sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak Nuryadi Kadir, S, Sos, M, A. selaku pembimbing II yang telah membantu segala masukan dan bantuan yang begitu berharga.
7. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, yang telah berkanan menerima kami dan mengambil data terkait dalam penyusunan skripsi ini.

9. Buat kawan-kawan, saudaraku di jurusan PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial “**Angkatan 2011**” tanpa terkecuali, semoga kebersaan serta perjuangan tetap berlanjut dan menjadi kenangan indah di masa yang akan datang.
10. Buat Muhammad Rasyid Endarman yang telah banyak membantu survey dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat seluruh yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik yang kalian berikan, Amin Ya Rabbal Alamin. Demikian penyusunan tugas akhir ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar , Maret 2016

**KASMIATI**



## DAFTAR ISI

<b>Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-15</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus .....	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>16-37</b>
A. Rumah Tangga .....	17
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	19
C. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ..	31
D. Upaya Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38-44</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40

E. Instrumen Penelitian .....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45-67</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Binamu .....	45
B. Peranan Instansi Pemerintah (Dinas Sosial) dalam Menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	50
C. Bentuk Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto.....	58
D. Kendala Apa yang di Hadapi oleh Pegawai Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68-69</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Implikasi Penelitian .....	68
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>70-71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
Tabel 4.2 Jumlah Guru dan Siswa Kec. Binamu .....	47
Tabel 4.3 Luas Daerah Pembagian Daerah Administrasi Kec. Binamu .....	48
Tabel 1.4 Bagan Struktur Organisasi UPTD-BLK .....	55



## **ABSTRAK**

**Nama : Kasmianti**

**Nim : 50600111016**

**Judul : Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto**

---

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran pegawai dinas sosial dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto? Adapun submasalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana peran pegawai dinas sosial dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto? 2) bagaimana bentuk penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pegawai dinas Sosial Kabupaten Jeneponto? 3) kendala apa saja di hadapi oleh pegawai dinas sosial dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangaa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengolahan data dan analisis data, observasi, wawancara, dokumentasi,, Pendekatan Penelitian ( Pendekatan Sosiologi, Komunikasi)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pegawai dinas sosial hanya sebatas bersosialisasi karena kendala dengan anggaran adapun anggaran yang di butuhkan untuk kegiatan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). masyarakat yang mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga hanya melaporkan kepihak keamanan yaitu kepolisian.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Setiap keluarga memimpikan dapat membangun keluarga harmonis, bahagia dan saling mencintai. Pengertian emosional yang sangat mendalam mengenai hubungan keluarga bagi hampir semua anggota masyarakat telah observasi sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Kedudukan utama setiap keluarga ialah fungsi pengantara terhadap masyarakat besar. Hanya melalui keluargalah masyarakat itu dapat memperoleh dukungan yang di perlukan dari pribadi-pribadi. sebaliknya, keluarga hanya terus dapat bertahan jika di dukung oleh masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat sebagai suatu sistem kelompok sosial yang lebih besar mendukung keluarga, sebagai sub sistem sosial yang lebih kecil, atau sebagai sarat agar keluarga itu dapat bertahan maka kedua macam sistem ini haruslah saling berhubungan dalam banyak hal penting.<sup>1</sup>

Namun keluarga yang ideal seperti penjelasan di atas tidak semua berjalan dengan baik, masih banyak perempuan yang mengalami perlakuan kasar dari sang suami. Arti dan makna kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan kerap dilakukan atas nama agama dan budaya.<sup>2</sup> Dilihat dari siklus kehidupan manusia, kekerasan terhadap perempuan sudah dilakukan bahkan sebelum ia dilahirkan. Bentuk kekerasannya berupa aborsi atas dasar selektif kelamin (misalnya tidak menginginkan anak perempuan), penganiayaan pada saat kehamilan, pemaksaan

---

<sup>1</sup> William J. Goode, *sosiologi keluarga* (cet.IV;Jakarta:Bumi Aksar,1995), h.2

<sup>2</sup> Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*(Makassar:Alauddin University Press),h.25

kehamilan seperti pemerkosaan massal pada saat perang.<sup>3</sup> Dari pengertian beberapa di atas, memberikan gambaran bahwa semua manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini akan mengalami tindakan kekerasan, dan umumnya yang menjadi korban kekerasan adalah perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat hal ini disebabkan karena ruang lingkup yang tertutup dan terjaga ketat privasinya (rahasia) dan persoalannya terjadi dalam area keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Kasus kekerasan yang sering terjadi di kabupaten Jeneponto sangat bermacam-macam ada bentuk kekerasan terhadap anak-anak, dan perempuan yang masih remaja. Tetapi kasus yang saya angkat merupakan tindak kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri masih banyak yang terjadi di kabupaten Jeneponto. Bahkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sang suami dianggap wajar oleh masyarakat sekitar tempat kejadian. Kurangnya pengetahuan masyarakat Jeneponto akan adanya hukum dan Undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan suami dengan leluasa menyiksa sang istri.

Namun pada kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih karena terjadi kekerasan dalam keluarga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan dalam rumah

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman, S.Ag, M.Pd,h.27

tangga (KDRT) dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlebih-lebih daerah terbuka dan informasi yang kadang kala budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa terfilter pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam rumah tangga.

Dalam hal ini peran dinas sosial atau di dalamnya terdapat lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah-masalah sosial termasuk yang telah ditangani yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dinas sosial telah melakukan tindakan penanganan seperti memberikan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, dan melakukan pendekatan terhadap suami istri yang bertikai agar kembali hidup harmonis.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang berbasis gender yaitu kekerasan terhadap perempuan termasuk pemukulan dan serangan fisik seperti penyiksaan anak-anak, yang dapat menimbulkan kesensaraan dan penderitaan bagi korbannya yang sebagian besar adalah kaum perempuan, dan pelakunya adalah kaum laki-laki.

Menurut UU NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.37.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama kekerasan yang dilakukan oleh sang suami terhadap istri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasusu yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan yang lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks, tidak seperti halnya kejahatan lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial. Perempuan yang dipukul oleh sang suaminya juga sama-sama membesarkan anaknya, mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terkait secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.<sup>5</sup>

Kasus yang terjadi di pattotongan yang penulis lihat sendiri suami menyiksa istrinya karena sang istri mengetahui bahwa sang suami melakukan perselingkuhan, karena sang suami tidak mau mengakuinya apa yang telah dituduhkan oleh istrinya sendiri sang suami langsung memukul dan menyiksa istrinya sampai gigi sang istri terlepas akibat menerima pukulan dari suaminya. Dalam kejadian ini awalnya warga dan keluarga yang melakukan kekerasan hanya diam dan menonton tetapi karena terlalu lama disiksa keluarganya bertindak untuk menghentikan atau memisahkan sang suami yang telah menyiksa istrinya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat membawa dampak negatif bagi korbannya khususnya perempuan yang berstatus sebagai istri, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan seorang perempuan menjadi stress, depresi, kehilangan harga diri, tidak berdaya, dibayang-bayangi

---

<sup>5</sup>Elsa R. M. Toule, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis" *Artikel* (Fakultas Hukum, Universitas Pattimura). h. 1

ketakutan, tidak bisa bertindak, pasrah akan nasib, putus asa, dan berbagai gangguan psikologis lainnya

Hal ini jelas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mengganggu ketahanan individu seorang perempuan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, bahkan dalam beberapa kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat mengakibatkan kematian korban, baik disebabkan karena dibunuh oleh suaminya maupun bunuh diri karena tidak kuat lagi dengan tindak kekerasan yang di alaminya.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi manusia Undang-Undang republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini, saling mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumaah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping sosial.<sup>6</sup>

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kec. Binamu Kab. Jeneponto, dari pokok permasalahan tersebut maka ada beberapa sub-sub pokok permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Dalam Rumah Tangga, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta,2013), h. 176.

1. Bagaimana peran pegawai dinas sosial dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto ?
2. Bagaimana bentuk penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kecamatan Binamu Kabupaten. Jeneponto?
3. Kendala apa saja di hadapi oleh pegawai dinas sosial dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga Kecamatan. Binamu Kabupaten. Jeneponto?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

#### **1. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini merupakan batasan peneliti agar jelas ruang lingkup yang akan di teliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti menfokuskan penelitian terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Jeneponto dan kendala apa saja yang dihadapi oleh dinas sosial dalam penganggulan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **2. Deskripsi Fokus**

Berdasarkan pada fokus penelitian pada judul di atas, dapat di deskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan pendekatan Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di kecamatan Kabupaten Jeneponto.

Untuk menghindari terjadinya berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini, penulis merasa perlu mengemukakan beberapa pengertian kata yang dianggap penting untuk di berikan pengertian agar terjadi interpretasi yang berbeda-beda yaitu:

- a. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kerugian, bahaya,



melukai secara fisik, seksual psikologi, termasuk pula tindakan mengancam, kekerasan dan perempasan secara sewenang-wenang terhadap kebebasan.

- b. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

#### ***D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu***

Sebatas pengetahuan peneliti, dengan membahas Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, karena belum banyak yang membahas sebagai karya tulis ilmiah lebih mendalam, khususnya kepada jurusan Kesejahteraan Sosial. Dengan melihat dari sedikitnya Instansi yang bergerak dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagai tempat untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini lebih khusus adalah keluarga, perempuan atau ibu rumah tangga.

Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti hanya menemukan beberapa buku dan artikel yang hampir sama

dengan judul penelitian yang penulis lakukan yaitu buku dan artikel yang berjudul yaitu:

- a. Nasrawati Mahasiswa Program S1 Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar menulis dalam bentuk jurnal pada tahun 2013 dengan judul: “Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer dan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum militer terhadap kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer.<sup>7</sup> Penelitian ini menyatakan bahwa perlunya melakukan penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang bekerja sama dengan Kodam, Pembinaan, Pengembangan, dan kegiatan-kegiatan yang baik oleh keluarga, serta penangkapan hingga penindakan kepada pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer.
- b. Evi Alfianti Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis dalam bentuk skripsi tahun 2014 dengan judul: “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM) Oleh Dinas Sosial DIY Di Hargorejo Kokap Kulonprogo”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program USEP-KM oleh Dinas Sosial DIY di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo

---

<sup>7</sup> Nasrawati, “Upaya Penanggulangan Kejahatan kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer Oleh Penegak Hukum Militer”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h. 5.

dan dampaknya bagi perkembangan kehidupan masyarakat desa tersebut.<sup>8</sup> Penelitian ini menyatakan proses pelaksanaan pemberdayaan program USEP-KM yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY ternyata cukup panjang dilihat dari siklus penumbuhan dan pembinaan USEP-KM.

- c. Khinanti Gebi Pradipta Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar menulis dalam bentuk skripsi tahun 2013 dengan judul : “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendorong seorang istri melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga untuk mengetahui upaya penanggulangan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri. Hasil dari penelitian ini disebabkan oleh emosi yang tidak dapat ditahan oleh istri, mendekatkan diri kepada keluarga terdekat atau melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga .<sup>9</sup> mulai dari tahap perencanaan program sampai ke tahap monitoring dan evaluasi. Adapun table kajian pustaka/penelitian terdahulu, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

---

<sup>8</sup> Evi Alfianti, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Sosial Ekonomis Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM) Oleh Dinas Sosial DIY Di Hargorejo Kokap Kulonprogo”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), h. 7.

<sup>9</sup> Khinanti Gebi Pradipta, “*tinjauan sosiologi hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri*”, Skripsi (Makassar Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013), h. 11

**Table 1.1**  
**Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Sumber, Tahun	Rumusan Masalah	Tujuan	Metodelogi Penelitian	Hasil	Perbandingan
1	Nasrawati, <i>Upaya Penanggulangan Kejahatn Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer</i> , skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013	1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer? 2. Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum militer dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer?	1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan militer 2. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum militer dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan	Deskriptif Dan Kualitatif	Kejahatan dalam rumah tangga di kalangan militer yaitu faktor ekonomi, minuman keras, orang ketiga, dan faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa.	faktor kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer karena ekonomi, minuman keras dan orang ketiga

			militer			
2	Evi Alfianti, <i>Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Sosial Ekonomis Produktif Keluarga Miskin (Usep- Km) Oleh Dinas Sosial Diy Di Hargorejo Kokap Kulonprogo</i>	1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program USEP-KM oleh Dinas Sosial DIY di desa hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo? 2. Bagaiman dampak dari program USEP-KM oleh Dinas Sosial DIY bagi perkembangan kehidupan masyarakat Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo	1. Mengetahui proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program USEP-KM oleh Dinas Sosisl DIY di Desa Harorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo 2. Mengetahui dampak dari program UEP- KM oleh Dinas Sosial DIY bagi perkembangan kehidupan masyarakat Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo	Deskriptif Kualitatif	Pemberdayaan program USEP- KM yang di lakukan oleh Dinas Sosial DIY ternyata cukup panjang. Dilihat dari siklus penyembuhan dan pembinaan USEP-KM, mulai dari tahap perencanaan program sampai ketahap monitoring dan evaluasi.	Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan pemberdayaan yang lebih baik oleh dinas sosial.

3	<p>Khianty Gebi Pradipta,  <i>Tujuan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2011/PN.MRS</i>  , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013</p>	<p>1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri dalam studi kasus Putusan No. 91/Pid.B/2011/PN. MRS?</p> <p>2. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah perilaku menyimpang seorang istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga?</p>	<p>1. Untuk mengetahui sejauh mana faktor ekonomi, social, dan budaya berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri.</p> <p>2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat membantu pencegahan perilaku menyimpang seorang istri dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga.</p>	Kualitatif Deskriptif	<p>Emosi yang tidak dapat ditahan oleh istri dan Mendekatkan diri kepada keluarga terdekat atau melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga</p>	<p>emosi penyebab tindak kekerasan dan keluarga dekat berperan penting dalam melakukan pencegahan dan perdamaian agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga</p>
---	---	---	---	-----------------------	---	---

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian sekarang. Adapun perbedaannya yaitu:

- a) Penelitian Nasrawati mengatakan bahwa faktor kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer karena ekonomi, minuman keras dan orang ketiga.
- b) Penelitian Evi Alviani mengatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan pemberdayaan yang lebih baik oleh dinas sosial.
- c) Penelitian Khianty Gebi Pradipta mengatakan bahwa emosi penyebab tindak kekerasan dan keluarga dekat berperan penting dalam melakukan pencegahan dan perdamaian agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan melihat beberapa hasil penelitian di atas, sehingga peneliti mencoba untuk meneliti peran dinas sosial dalam melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Dalam rangka mengarahkan rencana pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

## 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah di halaman sebelumnya, dapat penulis kemukakan sebagaimana berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Pegawai Dinas Sosial di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pegawai Dinas Sosial.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara lain yaitu:

- a. Kegunaan Ilmiah
  - 1) Sebagai bahan referensi perguruan tinggi khususnya jurusan PMI/kons. Kesejahteraan Sosial dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa mengenai Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pekerja sosial secara profesional bagi kalangan aktifis jurusan PMI/kons. Kesejahteraan Sosial untuk menambah wawasan dalam penyelesaian suatu masalah.



### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian dan bermanfaat bagi yang membacanya, dan melakukan aktivitas dilembaga pemerintah maupun di lembaga non pemerintah agar bisa dimaksimalkan. kepada Dinas Sosial untuk bisa mengembangkan program, sehingga bisa lebih bermanfaat di masa yang akan datang khususnya kepada para perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEOTERIS**

#### ***A. Rumah Tangga***

Pengertian rumah tangga tidak dapat di temukan dalam deklarasi PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dapat rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya

bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Rumah tangga adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Tidak ada satu pun keluarga yang tidak mengalaminya.

Pada tingkat yang wajar, pertengkaran bahkan bisa menjadi pewarna yang terdapat menambah semarak dan hangatnya hubungan antara suami dan istri. Akan tetapi kadang-kadang konflik dan ketegangan tersebut berkembang menjadi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relative tertutup, dan terjadinya dalam keluarga yang legal yakni perkawinan disertai dengan adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri dengan sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Keutuhan dan kekurangan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan

dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>1</sup>

Rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Ruamh tangga tersebut susunan dan wewenang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggung jawab dari masing-masing dan tercipta suasana yang harmonis. Ketidak harmonisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan

Pada hakikatnya, rumah tangga bertujuan memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, membentengi manusia yang luhur, mrnrgakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah bahwa manusia merupakan makhluk yang beragama, mencari keturunan yang halal.

## ***B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)***

### **a. Pengertian KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu sering kali dilakukan terhadap perempuan oleh pasangannnya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah dianggap kepermukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan dalam rumah tangga berlangsung setiap saat, fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan atau sang istri diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dan perspektif tersebut, kekerasan seperti dilihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan

---

<sup>1</sup> Nola Fitria, Sei “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), h. 6-7

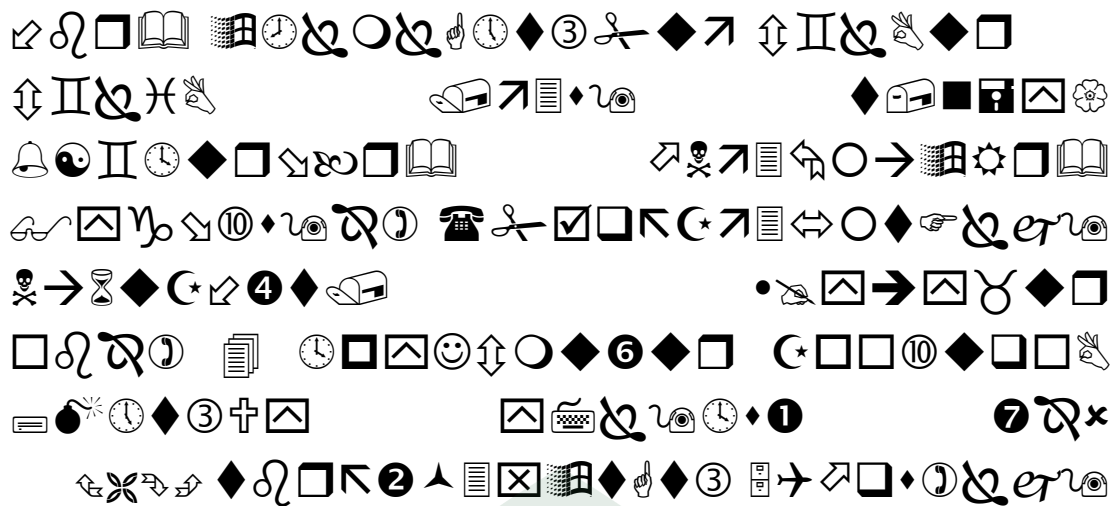
perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan didalam keluarga, dimana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup dibawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Dalam ajaran yang dianut oleh setiap agama termasuk agama Islam menentang keras akan adanya kekerasan terhadap perempuan baik berupa fisik, dan seksual. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah berlaku kasar terhadap seorang istrinya, meskipun pada saat itu Rasul merasa kurang senang terhadap sesuatu. Rasul terkenal sebagai lelaki yang berbudi mulia dan selalu membantu istri-istrinya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Bahkan ketika terjadi perang antara Rasulullah dengan beberapa istrinya beliau tidak memukul, tetapi memilih meninggalkan rumah. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa baik dari pernyataan Rasul maupun dari perlakuannya pada dasarnya Rasul melarang praktek kekerasan terhadap istri. Allah Swt berfirman dalam QS Ar Rum (30):21.

---

<sup>2</sup> "Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah tangga", *jurnal hukum*, (2007)



Terjemahnya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>3</sup>.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa baik pernyataan rasul maupun dari perlakuannya pada dasarnya rasul melarang praktek kekerasan terhadap istri selain itu untuk menguatkan ayat di atas dalam hadistnya Rasulullah SAW mengatakan:

“...para suami yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang-orang baik di antara kamu“(HR.Abu Daud, Nasa’I dan Ibnu Majah). Selain itu dikuatkan pula dengan hadist yg diriwayatkan oleh Aisyah Ra bahwa Rasulullah pernah bersabda “yang paling baik di kalangan kamu adalah mereka yang paling sopan terhadap istrinya” (HR.Tarmizi).<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qu'an dan terjemahannya*.(Bandung:CV Diponegoro,2001)

<sup>4</sup> Lembaga batuan hukum APIK Jakarta <http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20kdr%20dalam%20islam.htm> diakses tanggal 22 agustus 2015.

Dari penjelasan ayat dan hadist di atas menjelaskan bagaimana pentingnya menjadi keluarga harmonis. Sementara itu keluarga berkualitas, menurut rumusan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional adalah keluarga yang memenuhi ciri berikut: keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu sering kali dilakukan terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah dianggap kepermukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan dalam rumah tangga berlangsung setiap saat, fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan atau sang istri diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dan perspektif tersebut, kekerasan seperti dilihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan didalam keluarga, dimana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup dibawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang

perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri.<sup>5</sup> Adapaun data penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu:

**Table 2.1**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**  
**Di Kecamatan Binamu**

<b>Jumlah PMKS</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kemiskinan	6.024	6.055	6.024
Korban bencana alam	143	2.008	109
Lanjut usia	1.763	3.151	2.645
Penyandang cacat	973	973	722
Tindak KDRT	7	5	10
<b>Jumlah</b>	<b>8.910</b>	<b>12.192</b>	<b>9.510</b>

Sumber: Kabupaten Jeneponto Dalam Angka (BPS) Tahun 2015

Undang-undang republik Indonesia no. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan: a). bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pacasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, b). bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, c). bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan” dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari

---

<sup>5</sup> “perlindungan terhadap perempuan melalui undang-undang kekerasan dalam rumah tangga”, *jurnal hukum*, (2007)



kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perilaku yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, d). bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, e). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>6</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang di lakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut (pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan<sup>7</sup>. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga<sup>8</sup>.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga<sup>9</sup>. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang 2004, No 23

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan<sup>10</sup>.

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga social atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan<sup>11</sup>. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban<sup>12</sup>.

Sebagai besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga. Padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Dimana orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami istri atau mantan suami istri.
- b. Orang tua dan anak-anak.
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2004

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2004

- d. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetapkan disebuah rumah tangga.
- e. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud dengan orang yang hidup bersama adalah pasangan yang hidup bersama atau beberapa orang yang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu)

Kebanyakan orang menganggap kekerasan hanya dalam konteks yang sempit, yakni seperti perang, pembunuhan atau kekacauan, padahal kekerasan itu bentuknya bermacam-macam fenomena yang dapat dikategorikan dalam kekerasan seperti ini banyak sekali jumlahnya<sup>13</sup>. Ada 4 jenis kekerasan yaitu:<sup>14</sup>

1. Kekerasan langsung (*direct violence*): mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung, yang termasuk dalam kategori adalah semua bentuk pembunuhan dan semua bentuk tindakan paksaan atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (penyiksaan, penganiayaan) tindakan tersebut mengganggu hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.
2. Kekerasan tidak langsung (*indirect violence*): mengacu pada tindakan kekerasan melalui perantara atau kelalaian.

---

<sup>13</sup> Jamil Salmi, *Kekerasan Dan Kapitalisme (Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak-hak Asasi Manusia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm 29

<sup>14</sup> Nurlena Setyaningsih, " Penanganan Tindak kekerasan Terhadap Perempuan", Jurnal ilmiah, 2014: h. 9.

3. Kekerasan represif (*repressive violence*): berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk di lindungi dari kecelakaan.
4. Kekerasan alienatif (*alienating violence*): pencabutan hak individu yang tinggi.

Pada dasarnya bentuk kekerasan tersebut bukan hanya ditujukan kepada perempuan yang biasanya sering menjadi obyek kekerasan oleh suami, hal ini juga dapat dialami oleh anak maupun suami, mertua, ipar dan pembantu rumah tangga (prt) mereka yang berada didalam lingkup keluarga dan rumah tangga.

Bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Undang-Undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- b. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- c. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan huku
- e. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nofarina, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah*, (2012): h.5.

## b. Teori Psikologi Sosial

Heider menganut metode konstruksi dari Lewin dalam teorinya untuk menerangkan hubungan antarmanusia. Namun, berbeda dari Lewin yang menggunakan konsep-konsep dan istilah-istilah khusus, Heider menggunakan istilah sehari-hari yang digunakan orang awam. Karena itu, Psikologi Heider disebut juga psikologi *common-sense*, alasan Heider adalah bahwa *common sense* (logika berpikir sehari-hari) merupakan hal yang mengatur tingkah laku orang terhadap orang lain, selain itu, *common sense* juga banyak mengandung kebenaran.

Salah satu teori untuk menerangkan terbentuknya sikap ini dikemukakan oleh Daryl Beum (1964) yang merupakan pengikut Skinner (berpandangan operant), ia mendasarkan diri pada pernyataan Skinner bahwa tingkah laku manusia berkembang dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat yang memberi penguat pada individu untuk bertingkah laku secara tertentu (yang dikehendaki oleh masyarakat). Atas dasar pendapat Skinner itu, Beum mengemukakan empat asumsi dasar yaitu:

1. Setiap tingkah laku, baik dari verbal maupun sosial, merupakan suatu hal yang bebas dan berdiri sendiri, bukan merupakan refleksi (menggambarkan) sikap, sistem kepercayaan, dorongan, kehendak, ataupun keadaan-keadaan tersembunyi lainnya dalam diri individu.
2. Rangsang dan tingkah laku-balas adalah konsep-konsep dasar untuk menerangkan suatu gejala tingkah laku. Konsep-konsep ini hanya dapat didefinisikan dan diukur secara fisik dan nyata (tampak mata)

3. Prinsip-prinsip hubungan rangsang-balas sebetulnya hanya sedikit, prinsip ini tampak sangat bervariasi karena bervariasinya lingkungan dimana hubungan rangsang-balas itu berlaku.
4. Dalam analisis tentang tingkah laku perlu di hindari di ikut sertakannya keadaan-keadaan internal yang terjadi pada waktu tingkah laku itu timbul, baik yang bersifat fisiologik (kelelahan, lapar, dan lain-lain) maupun yang bersifat konseptual (dorongan, kehendak, dan lain-lain)

Perlu dicatat bahwa potsulat yang dijadikan dasar oleh Schutz adalah banyak perilaku yang terjadi pada masa dewasa merupakan kelanjutan dari kondisi hubungan orang tua anak pada masa kecil. Dengan demikian, kalau seorang mendapati dirinya pada posisi “anak” dalam hubungannya dengan orang lain, maka ia akan memilih tingkah laku yang sama dengan yang dulu di lakukan oleh orang tuanya. Sebaliknya, kalau dalam hubungan itu ia melihat posisinya sebagai “orang tua”, maka ia akan melakukan yang pernah di lakukan oleh orang tuanya sendiri semasa ia kanak-kanak. Dengan begitu, kita dapat meramalkan tipe perilaku mana yang akan terjadi pada orang dewasa kalau kita dapat mengetahui bagaimana pola hubungan orang tua-anak dari orang tersebut di masa kecilnya. Akan tetapi, Schutz sendiri tidak menjelaskan indicator-indikator sehingga seseorang melihat dirinya berada pada posisi anak atau

orang tua dalam suatu hubungan antarpribadi tertentu. Dengan demikian, fungsi peramalan dari teori ini menjadi kecil artinya.<sup>16</sup>

Zastrow dan Browker (dalam Wahab 2010) mengatakan bahwa terdapat 3 teori yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu teori biologis, teori control, dan teori frustrasi-agresi.

1. Teoris Biologis memandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir memiliki insting agresif. Pendiri psikodinamika, Sigmund Freud, menjelaskan bahwa manusia mempunyai insting kematian yang di manifestasikan dengan melukai dan membunuh diri sendiri atau orang lain. Menurut Konrad Lorenz, kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan ini membantu seseorang untuk memperoleh dominasi dalam kelompok. Beberapa ahli biologi, berpendapat bahwa pria memiliki lebih hormone yang menyebabkan berperilaku agresif dari pada wanita. Teori ini seperti memberikan penjelasan mengapa KDRT lebih banyak di lakukan oleh pria.
2. Teori Kontrol menerangkan bahwa orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang yang cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang agresif. Travis Hirschi melalui semuanya mendukung orang lain. Hal sama

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. sarlito Wirawan sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 20-59-155

juga terjadi pada mantan narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman dan keluarganya.

3. Teori Frustasi-Agresi memandang kekerasan merupakan cara seseorang mengurangi ketegangan yang di akibatkan oleh situasi yang membuat frustrasi. Orang yang frustrasi akan melakukan agresi (kekerasan) kepada sumber frustrasi atau kepada orang lain yang bisa jadi pelampiasan. Misalnya, seorang suami yang kekurangan penghasilan dan memiliki harga diri rendah, memanifestasikan rasa frustasinya kepada istri dan anak-anaknya. Teori ini sedikit banyak juga dapat menjelaskan kasus yang kami angkat pada paper “Menelaah kasus kekerasan dalam rumah tangga”.<sup>17</sup>

### **C. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)**

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam. Mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, salah satu analisis yang dikemukakan adalah bahwa ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi si istri kepada san istri. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (biasa disingkat KDRT) yang disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya memungkinkan seorang suami merendahkan si istri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup><http://zulfaalfaruqy.blogspot.co.id/2015/02/psikologi-keluarga-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html?m=1> (diakses 13 Desember 2015)

<sup>18</sup> Nola Fitria, Sei “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), h. 6



Rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Rumah tangga tersebut susunan dan wewenang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggungjawab dari masing-masing dan terciptanya suasana yang harmonis. Ketidak harmonisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan masalah yang baru, tetapi tetap actual dalam peradarn waktu dan tidak kunjung reda, malahan memperlihatkan kecenderungan peningkatan, untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ternyata tidak segampang membalikan tangn. Masih banyak kasus yang sengaja ditutupi hanya karena takut menjadi aib keluarga. Padahal tindak kekerasan yang dilakukan sudah tergolong tindak pidana, atau persoalan anak dan perasaan masih cinta merupakan hal yang kerap dirasakn korban kekerasan dalam rumah tangga di negara Republik Indonesia.

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas yan lainnya, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti tindakan penganiayaan dan lain-lain. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam hal ini pemerintah khususnya, telah melakukan beberapa upaya penanganan terhadap para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kebijakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebelum adanya UU PKDRT disahkan, di tingkat nasional telah ada upaya bernama lintas institusi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada perempuan korban kekerasan. Inisiatif ini tidak bisa dilepaskan dari desakan masyarakat agar Negara melaksanakan tanggung jawabnya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kepada perempuan. Inisiatif ini muncul pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya surat kesepakatan bersama antara menteri pemberdayaan perempuan, menteri kesehatan RI, menteri sosial RI, kepala kepolisian RI tentang pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Lembaga Pengada layanan bagi perempuan korban KDRT, dalam 10 tahun jumlah lembaga mpengada layanan bagi perempuan korban tumbuh dengan pesat. Lembaga layanan semakin meningkat dan menyebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa manimpah siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak, ataupun pembantu rumah tangga. Akan tetatp, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Tidak sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu yang bersamaan.

Sekalipun kaum laki-laki terkesan actor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya.<sup>19</sup>

Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya diluar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia. Ajaran pernikahan dalam islam tidak berdiri diatas lahan kosong, tetapi merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan islam.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu:

1. Penyebab Kdrt
  - a) Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
  - b) Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
  - c) Kdrt dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
  - d) Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan
2. Penyebab Individu
  - a) Sering mabuk karena minuman beralkohol

---

<sup>19</sup> Andi yul, " perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga," Jurnal Ilmiah,(2013): h.12-13

- b) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan sulit
- c) Pelaku tidak bisa mengontrol kemarahannya
- d) Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata
- e) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga

### 3. Penyebab Keluarga

- a) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai satu sama lain, serta tidak menghargai peran wanita
- b) Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga
- c) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas

### 4. Penyebab Masyarakat

- a) Kemiskinan
- b) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapat antara penduduk

### 5. Penyebab lain

- a) Himpitan ekonomi keluarga
- b) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress

- c) Kondisis lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.<sup>20</sup>

#### ***D. Upaya Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga***

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang suami ataupun sang istri, telah sedemikian menggaung belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak menjadi, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus di perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat pada sasaran.

Upaya terjadinya tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nasrawati, "Upaya Penanggulangan Kejahatan kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer Oleh Penegak Hukum Militer", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h. 31-32

<sup>21</sup> Khinanty Gebi Pradipta, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri", *Skripsi* (Makassar Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013), h. 64-65

Penanggulangan Kejahatan (criminal Prevention) terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

### **1. Upaya Pre-Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini ialah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam Pre-Emtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu  $Niat + Kesempatan = Kejahatan$ .

### **2. Upaya Preventif**

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya Preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan secara Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahatn menjadi lebih kembali, sebagaimana

---

semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahatn perlu dipertahankan dan diarahkan agar tidak kembali terjadi lagi.

### **3. Upaya Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatn yang tindakannya berupa penegakan hukum.

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang timbul setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agart mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup>Khinanty Gebi Pradipta,” Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri”, *Skripsi* (Makassar Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013), h. 47-49

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan di atas maka penelitian yang di lakukan meliputi:

##### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>1</sup> Penelitian ini lebih mementingkan ketepatan dan kecakupan data, dan penekanan dalam penelitian ini adalah validitas data yaitu kesesuaian antara yang dicatat sebagai data dan yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti.<sup>2</sup> Sehingga penelitian ini mengkaji objek yang mengungkapkan suatu fenomena yang ada melalui pengumpulan data.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang di maksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan di lakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yaitu Dinas Tenaga

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 166

<sup>2</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, h. 175



Kerja Transmigrasi dan Sosial yang berlokasi di Jln. Abd. Jalil Sikki No. 24 di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan penulis dalam menganalisis sarannya dalam disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai latar belakang penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendekatan komunikasi**

Pendekatan komunikasi adalah suatu pendekatan yang mempelajari hubungan interaksi komunikasi dalam kehidupan masyarakat yang bisa berlangsung baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal.

### **2. Pendekatan sosiologi**

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dibutuhkan untuk mengetahui hubungan sosial masyarakat sebagai objek dalam suku atau etnik,

## **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari informasi kunci yang jadi pelaku utama. Pengambilan sampel yang didasarkan pada kedalaman informasi yang didapat tentang fokus penelitian yang akan dibahas. Biasanya, hal ini dilakukan dengan menetapkan informan sebagai sumber data, yang kemudian dikembangkan ke informan yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data yang bersifat primer data yang bersifat sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini di bagi ke dalam dua jenis data yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang di peroleh melalui wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait. berapa informan?rt?rw?
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Penelitian Lapangan**

Penelitian di lakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, di laksanakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang di teliti. Observasi di lakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk mengetahui secara langsung penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam<sup>3</sup>. Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh penelitian dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti<sup>4</sup>.

Wawancara dimaksudkan untuk dapat memperoleh suatu data berupa informasi dari informan, selanjutnya peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui pengolahan data secara konferensip, sehingga wawancara tersebut dapat memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten jenepono.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi di gunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu

---

<sup>3</sup> Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2008), h.67-68

<sup>4</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta,2009),h. 138

didapat, penelitian mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto serta pihak yang memberikan informasi.

## **2. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian di laksanakan melalui kepustakaan dengan mengambil, menganalisa, mempelajari karya ilmiah, dokumen/arsip dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pengutipan dalam metode ini sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip suatu karangan tanpa merubah redaksinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip suatu karangan dengan bahasa sendiri tanpa mengubah maksud dan pengertian yang ada.

## **E. Instrumen Penelitian**

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjawab focus dan mengakses data secara komprehensif dan mendalam adalah dengan memasang berbagai jenis instrument penelitian sebagai alat pengumpul data.<sup>5</sup> Dalam rencana penelitian ini yang akan menjadi instrumen adalah peneliti sendiri karena jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Setelah masalah di lapangan terlihat jelas, maka instrumen didukung dengan pedoman wawancara, observasi, alat dokumentasi, dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

---

<sup>5</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, h. 137

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis

Setelah semua data terkumpul yang di peroleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang di peroleh dalam bentuk kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Analisis data yang tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai, dalam hal ini sementara data yang dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data yang secara bersamaan. Sebaliknya pada saat menganalisa data, peneliti dapat kembali lagi kelapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.<sup>6</sup> Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam rencana peneliti adalah:

### 1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, selain melalui kepustakaan penelitian juga melakukan observasi serta *interview* (wawancara) kepada beberapa informasi. *Interview* dilakukan agar penulisan mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang akan diteliti.

### 2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus –menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.

### 3. Penyajian Data

---

<sup>6</sup>Bagong Suyanto dan Suinah, *Metode Penelitian Sosial* , h. 172

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, penelitian akan lebih mudah memahami masalah yang sedang terjadinya yang harus dilakukan.

#### 4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti dari data yang telah ditampilkan. Pemberi makna ini tentu saja sejauh pemahaman penelitian dan interpretasi yang dibuatnya.<sup>7</sup> Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan yang utuh



---

<sup>7</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 148

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Binamu**

##### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Jeneponto terletak pada bagian selatan pulau Sulawesi, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kira-kira 100 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Jeneponto berada antara pada 5o.23'12"-5o.42'1,2" LS sampai 119o.29'12"-119o.56'44,9" BT, dan luas wilayah Kabupaten Jeneponto 749,79 km<sup>2</sup>.

Kecamatan Binamu merupakan Kecamatan dengan luas daerah ke-4 terbesar dari 11 Kabupaten Jeneponto yakni sebesar 69,49 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,27%. Kecamatan Binamu terdapat 12 Kelurahan dan hanya terdapat 1 desa. Dari ke 13 daerah tersebut hanya 5 kelurahan yang merupakan daerah perkotaan dimana jumlah rumah tangga pertanian dibawah 70% yakni Kel. Empoang sebagai pusat Ibukota, Kel. Balang Toa, Kel. Balang, Kel. Monro-Monro dan Kel. Pabiringa.

##### **2. Demografi**

Badan Pusat Statistik dalam melakukan pendataan menggunakan konsep usual residence yaitu penduduk dicatat sesuai tempat biasanya dimana dia tinggal, tanpa perlu memperhatikan bahwa orang tersebut mempunyai KK, KTP atau tidak, dengan menerapkan batasan telah menetap diwilayah tersebut selama 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan namun berniat untuk menetap distu, maka jika memenuhi persyaratan tersebut, maka akan dicatat sebagai penduduk dimana dia tinggal dan

tentunya ini akan menghindari terjadinya penduduk tercatat dua kali ditempat yang berbeda-beda.

Jumlah penduduk Kecamatan Binamu tercatat 54.040 jiwa yang terdiri dari 26.229 laki-laki dan 27.811 perempuan dan dihuni 11.688 Rumah Tangga di masing-masing rumah tangga dihuni 5 anggota rumah tangga. Data ini memperhatikan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Binamu sebesar 0.62 persen, dengan luas wilayah sekitar 64,49 km<sup>2</sup>, maka setiap km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 778 jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen (%)
1	Laki-laki	26.229	48.6 %
2	Perempuan	27.811	51.4%
	Jumlah	<b>54.040</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Kecamatan Binamu dalam Angka 2015 (BPS)

Pendidikan peningkatan jumlah murid sekolah dikecamatan Binamu harus diimbangi dengan peningkatan jumlah sarana sekolah. Di tahun 2014 tercatat jumlah murid SD sederajat sebanyak 3.664 murid yang tersebar di 32 SD di desa/kelurahan, tercatat jumlah guru SD sederajat 504 guru. Untuk Siswa SMP sederajat tercatat 2.778 Siswa yang tersebar di 10 SMP dan 4 MTS. Rasio jumlah siswa sekolah SMP sederajat di Kecamatan Binamu adalah 198 yang berarti satu sekolah menampung sekitar 198 siswa sedangkan untuk SMA sederajat tercatat sebanyak 4.476 siswa dari 15 sekolah dengan rasio sebesar 298 yang berarti setiap sekolah SMA sederajat menampung 29 siswa, tercatat jumlah guru MTS 130 guru dan SMA 346 guru. Munculnya yayasan swasta memberikan andil besar dalam pengembangan dunia pendidikan di Jeneponto



**Tabel 4.2**  
**Jumlah Guru dan Siswa Kec Binamu 2014-2015**

No	Uraian	2013	2014
1	Murid/Guru TK	977/116	1.120/121
2	Siswa/Guru SD	7.352/294	3.664/504
3	Siswa/Guru MTs	1.000/106	1.123/103
4	Siswa/Guru SMA/SMK	2.754/370	3.719/346
<b>Jumlah</b>		12.083/886	9.626/1.074

Sumber: Kecamatan Binamu dalam Angka 2015 (BPS)

Adapun kemiskinan yang berdasarkan hasil PPLS 2011, pemerintah menetapkan bahwa rumah tangga miskin di bagi kedalam 4 tingkat kategori yaitu sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin. Di Kecamatan Binamu, untuk kategori sangat Miskin dan Miskin terbanyak ditemui di Kelurahan Pabiringa sebesar 13,07 persen dari 2.386 rumah tangga yang terkategori sebagai rumah tangga sangat Miskin dan Miskin, sedangkan Kelurahan Monro-Monro dengan 3,01 persen merupakan daerah presentase rumah tangga sangat miskin dan miskin paling kecil.

Salah satu indikator yang dapat menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari suatu daerah adalah kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan dapat menciptakan masyarakat yang bebas dari berbagai macam penyakit serta meminimalisir tingkat kematian bayi, olehnya itu keberadaan bidang desa adalah kementerian. Keberadaan rumah sakit baru sangatlah membantu dalam peningkatan pelayanan kesehatan, hal ini tentunya harus ditunjang dengan maksimalisasi pelayanan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional, olehnya itu

pemerintah senantiasa meningkatkan jumlah pegawai kesehatan khususnya dokter baru yang memiliki spesialisasi di bidang sehingga proses pelayanan lebih terpadu. Dalam pelaksanaan pembangunan system kesehatan keluarga bencana pemerintah kecamatan binamu melalui PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Bencana) sangat berperang pentingdalam mengontrol tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini peningkatan kesehatan bayi/balita, hal ini dapat di lihat dari adanya pos KB di setiap Dusun/Lingkungan plus satu dan sarana klinik KB Puskesmas. Untuk lebih jelas jumlah penduduk Kecamatan Bianamu per-desa dapat di lihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Luas Daerah Pembagian Daerah Administrasi**  
**Di Kecamatan Binamu Tahun 2015**

No	Desa/Kel	Luas(Km <sup>2</sup> )	Prsentase (%)
1	Biringkassi	8.73	12.56
2	Pabiringa	2.91	4.19
3	Panaikan	3.14	4.52
4	Monro-Monro	4.28	6.16
5	Sidenre	3.19	4.59
6	Empoang Selatan	8.01	11.53
7	Empoang	9.45	13.6
8	Balang Toa	2.63	3.78
9	Balang	4.02	5.79
10	Balang Baru	5.04	7.25
11	Bontoa	4.13	5.94
12	Sapanang	3.87	5.57
13	Empoang Utara	10.09	14.52
Jumlah		69.49	100

Sumber:Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2015(BPS)

### 3. Sejarah Singkat Kecamatan Binamu

Binamu merupakan zaman masa lampau memang sebuah pekerjaan yang tidak selalu mulus, karena kadang sebuah peristiwa masa lalu tidak pernah terungkap atau terungkap secara samar-samar. Termasuk jika kita akan mempelajari sejarah kerajaan binamu yang terletak di kabupaten Jeneponto provinsi Sulawesi selatan saat ini, yang tersisa dan dikenal luas dari peninggalan kerajaan yang pernah menguasai ujung selatan jazirah Sulawesi ini adalah sebuah kompleks makam raja-raja binamu.

Membahas tentang kerajaan binamu, pada dasarnya adalah berbicara mengenai toponim-toponim kerajaan lokal, diantara toponim tersebut, sekarang ini berlokasi di wilayah kabupaten Jeneponto. Kerajaan lokal itu mempunyai sistem pemerintah, wilayah, komunitas, beserta tradisi tersendiri, adapun toponim-toponim kerajaan kuno Turatea seperti; binamu, bangkala, kalimporo', garassi, layu, sapanang, tarowang, sidenre dan arungkeke. Turatea adalah sebuah kerajaan yang beretnis Makassar yang memiliki sistem pemerintah tersendiri, salah satu keunikan Jeneponto pada beberapa kerajaan lokal ada yang mempunyai mitologi tersendiri perihal munculnya raja pertama atau lazim disebut tamarunung. Mitos-mitos tamarunung itu mempunyai formula-formula cerita yang unik yang menjadi karakter penceritaan setiap daerah, tentu saja seperti itu mengandung nuansa sejarah dan budaya yang amat penting dalam memberikan pemahaman terhadap Jeneponto. Demikian halnya cara berfikir, pandangan hidup dan gairah batin masyarakat Jeneponto pada masa lampau.

Dalam sejarahnya, Jeneponto berada dalam lintas politik kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Luwu, kemudian Gowa dan yang terakhir Bone. Pengaruh tiga kerajaan tersebut semakin memberikan warna Jeneponto dan sejarahannya

sejarah dan budayanya disamping tetap memperlihatkan identitas lokalnya yang khas. Kata Jeneponto adalah sebuah nama yang baru muncul pada abad XIX dan munculnya nama tersebut sangat terkait dengan kepentingan pemerintah colonial diwilayah Selatan Sulawesi Selatan.

Makam raja-raja Binamu, berundak tiga dan berelief Ayam jago, singa, dan kuda, ini menandakan sang raja yang dimakamkan ini sewaktu hidup gemar menyabung ayam, tobarani (pemberani) dan gemar berburu berburu jonga. Pada umumnya makam raja-raja Binamu dulu pada selalu bercerita tentang keseharian, berhubungan dengan kebiasaan, itu disebabkan setelah meninggal diabadikan dalam bentuk relief.

#### **B. Peranan Instansi Pemerintah ( Dinas Sosial) dalam Menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Peran Instansi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bermasalah dalam kehidupan sosialnya seperti tindak kekerasan, kemiskinan, rumah tidak layak huni, dan kesehatan.

PMKS ( salah satunya korban kekerasan rumah tangga) tetapi dinas sosial kabupaten Jeneponto tidak mengikuti program kementrian sosial tentang korban kekerasan tapi pegawai dinas sosial hanya sebatas sosialisasi semata dan tidak bekerja sama dengan pihak kepolisian jadi korban yang mengalami tindak kekerasan langsung melapor kepihak berwajib yaitu polisi.

Pemberian pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan keperluan orang lain, dengan demikian maka pelayanan harus dipandang sebagai suatu manfaat. Adapun jenis-jenis pelayanan Dinas Sosial,sebagai berikut:

- a. Bidang Pelayanan Tindak Kekerasan

Bidang pelayanan tindak kekerasan pada unit ini melakukan kegiatan yang meliputi:

1. Berkewajiban melakukan pemulihan psikososial, rehabilitas, atau pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Tersedia tenaga medis dan adanya petunjuk pelaksanaan penanganan korban
3. Melakukan sosialisasi, melalui pelatihan rutin di bidang sosial, pelatihan keterampilan kepada korban, antara lain bidang usaha, untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.
4. Dalam penanganan korban dapat di rujuk kerumah penampungan (shelter), hal ini tersedia di NTB, Lampung dan Sumut. Sedangkan di Kalbar tersedia rumah aman untuk korban, yakni rumah Sosial Perlindungan anak, ruang konseling. di Sulawesi Selatan baru akan tersedia trauma center.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Persyaratan Dasar

Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan khususnya dalam pemenuhan pelayanan kesehatan diberikan kepada warga masyarakat yang miskin/kurang mampu diberikan secara gratis di kabupaten/kota, program ini diberikan dengan ketentuan:

- a) Terdaftar dalam *database* penduduk miskin
- b) Tidak terdaftar dalam *database* namun sedang dalam proses verifikasi pada sistem pengaduan masyarakat
- c) Warga miskin yang tidak memiliki persyaratan data di atas tetapi karena suatu sebab resiko sosial lainnya telah menyampaikan

permohonan kepada bupati, kebutuhan yang mendesak masalah darurat.

## 2. Persyaratan Khusus

Memenuhi aturan/syarat-syarat/kriteria yang ditentukan sesuai dengan program yang diberikan.

## 3. Jenis Layanan yang Diberikan

- a) Pelayanan rawat jalan dan rawat nginap secara gratis seperti, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah, Asuransi Kesehatan, dan lain;lain.
- b) Pelayanan gawat darurat dan perawatan tingkat lanjut
- c) Keringanan biaya pelayanan kesehatan dengan surat rekomendasi dari dinas kesehatan setempat.

## c. Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

### 1. Persyaratan Dasar

Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan khususnya dalam pemenuhan pelayanan sosial diberikan kepada warga masyarakat yang miskin/kurang mampu secara gratis di kabupaten/kota.

- a) Terdaftar dalam *database* penduduk miskin
- b) Tidak terdaftar dalam *database* namun sedang dalam proses verifikasi pada sistem pengaduan masyarakat
- c) Warga miskin yang tidak memiliki persyaratan data di atas tetapi karena suatu sebab resiko sosial lainnya telah menyampaikan permohonan kepada bupati. Resiko sosial yang dimaksud misalnya terkena musibah bencana, kebutuhan yang mendesak masalah darurat.

## 2. Persyaratan khusus

Memenuhi aturan/syarat-syarat/kriteria yang ditentukan sesuai dengan program yang diberikan.

## 3. Jenis Layanan yang Diberikan

- a) Pemberdayaan sosial kelompok Usaha Bersama (KUBE), sebagai modal untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat.
- b) Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai program perlindungan yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan tujuan untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c) Program Kesejahteraan Sosial Anak (PSKA), sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak.
- d) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), sebagai bentuk perlindungan sosial yang ditujukan untuk meringankan beban hidup lanjut usia terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dalam pemberian bantuan berupa uang yang disertai dengan pendampingan.
- e) Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK) untuk memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas.
- f) Program bantuan pemugaran RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) melalui Bedah Kampung (BEDKAM) untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Adapun instansi lain yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain yaitu:

a. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kapolsek Jeneponto

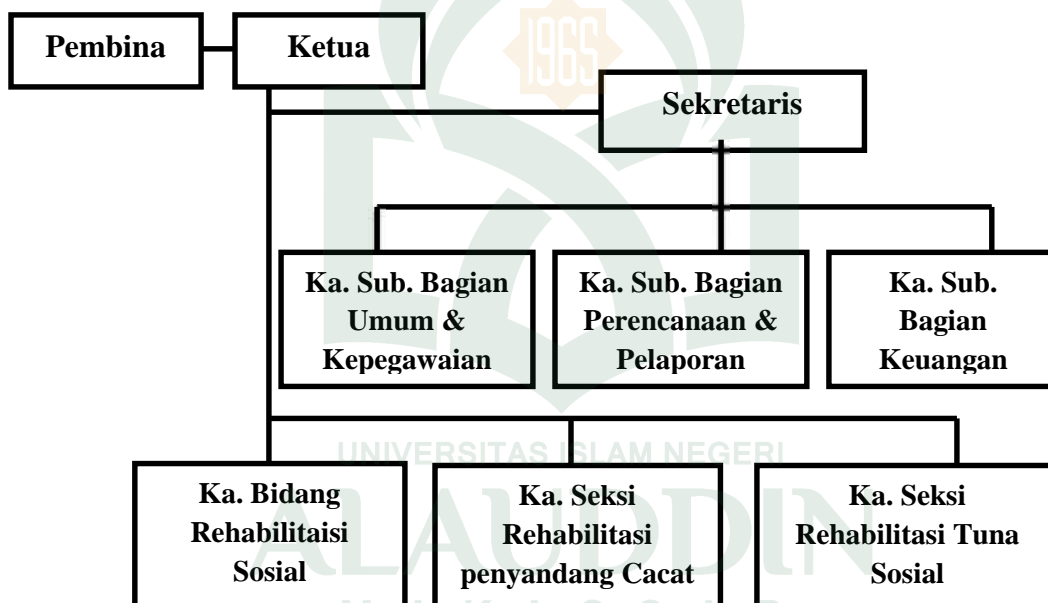
1. Untuk melakukan penanganan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan/anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Adanya rasa nyaman/tidak menyheramkan, petugas tidak berseragam kepolisian, di pimpin oleh polisi wanita, termasuk untuk penanganan korban juga di lakukan polwan atau PNS perempuan.
3. Terstruktur, di Jeneponto telah terstruktur 3 tahun yang lalu dan dampaknya positif terutama adanya motivasi yang kuat staf.
4. Visi RPK:” perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan medis, psikologi, maupun hukum sampai masalah terselesaikan.
5. Misi RPK adalah memberikan rasa aman dan nyaman; memberikan pelayanan secara cepat, profesional, empati, dan rasa kasih; membangun jaringan kerja sama antar instansi/lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Tugas RPK ialah menerima pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), membuat laporan, permohonan visum jika di perlukan, dan merujuk korban ke rumah sakit; menjelaskan hak-hak korban dan merahasiakan identitasnya; memberikan konseling bagi korban yang datang dalam keadaan depresi, atau menempatkan korban ke shelter, jika perlu perlindungan. Memberikan kemudahan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melaporkan kasusnya dengan tujuan selain untuk memberikan pelayanan yang nyata



membantu korban juga. Upaya bantuan hukum juga di berikan kepada korban dengan cara mendatangi korban; melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik dalam hal korban menderita cacat, dengan terus memproses kasusnya walau korban menarik laporannya. Hal ini di lakukan dengan pertimbangan karena dampak yang di derita korban dan kasusu tersebut juga bukan delik aduan sehingga dengan meneruskannya kepangadilan di harapkan pelaku menjadi jera dan memberi efek pada penurunan kasus.

Adapun struktur organisasi UPTD-LLK dapat dilihat pada bagan berikut:

**Gambaran 4.4 Bagan Struktur Organisasi UPTD-LLK**



Sumber: dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial 16 november 2015

**Tugas pokok fungsi struktur organisasi UPTD-LLK yaitu:**

1. Pembina dalam hal ini adalah Bupati Jeneponto dan Wakil Bupati Jeneponto yang bertanggung jawab melindungi sekaligus memberikan arahan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial “UPTD-LLK”.

2. Ketua dijabat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja , Trasmigrasi Dan Sosial yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugas pokok atau fungsi yang melekat kepada kantor Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Sosial. Kepala Dinas melakukan kordinasi dan membangun komunikasi kepada seluruh pimpinan SKPD.
3. Dinas Tenaga kerja, Trasmigrasi dan sosial merupakan penanganan masalah kesejahteraan sosial yang mempunyai tugas pokok bagi kepala bagian rehabilitasi sosial. Fungsinya yaitu yang mempunyai masalah PMKS akan mendampingi dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh bupati
4. Bidang-bidang penanganan masalah sosial masyarakat terdiri dari pimpinan SKPD dan organisasi masyarakat lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto yang akan bertanggung jawab semua atas penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi Dan Sosial. Adapun bidang-bidang penanganan masalah sosial terbagi 3 yaitu:
  - a) Bidang-bidang rehabilitas sosial yang terdiri dari: kepala bidang, mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pembinaan rehabilitasi sosial, mencakup kegiatan rehabilitas penyandang cacat dan rehabilitas tuna sosial. Tugas pokok yaitu:menyusun rencana kegiatan/ Program Rehabilitas Sosial, menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainyang relevan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
  - b) Bidang-bidang rehabilitasi penyandang cacat; kepala seksi rehabilitasi yang mempunyai tugas mengawasi dan melaksanakan pembinaan kegiatan

rehabilitas penyandang cacat, termasuk kegiatan perencanaan, arahan pelaksanaan tugas, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas, kordinasian, serta laporan pelaksanaan program/kegiatan diseksi rehabilitasi penyandang cacat.

- c) Bidang-bidang rehabilitasi tuna sosial; kepala seksi, rehabilitasi yang mempunyai tugas mengawasi dan melaksanakan pembinaan kegiatan rehabilitas tuna sosial, termasuk kegiatan perencanaan, arahan pelaksanaan tugas, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas, kordinasian, serta laporan pelaksanaan program/kegiatan diseksi rehabilitasi tuna sosial.

**Tabel 4. 5**  
**Daftar Nama-Nama Personil**

No	POSISI	NAMA	JABATAN
1	Bidang Rehabilitasi Sosial	Abdul Rasyid Akib, BSW	Kepala Bidang
		Sapiuddin, S.Sos	Kasi. Peny. Cacat
		St. Arnida Nur, S.Sos	Kasi. Tuna Sosial
		Halijah	Staf Seksi Tuna Sosial
		Amir Raba	Staf Seksi Tuna Sosial
		Abdul. Rahman, SE	Staf Seksi Peny. Cacat
		Rosmala Santi	Staf Seksi Peny. Cacat
2	Bidang Kesetiakawanan	Dahlia. DL	Kepala Bidang
		Syarifuddin, SE	Kasi. Usaha Pely. Sos
		Juanda. AD, S. Sos	Staf Seksi Usaha Pelayanan Sosial
		Fayantimala	Staf Seksi Usaha

	Sosial		Pelayanan Sosial
		Suaib. L, S. Sos	Staf Seksi Usaha Pelayanan Sosial
		Sapiuddin, S. Sos	Kasi. Bantuan Sosial
		Mantari, S. Sos	Staf Seksi Bantuan Sosial

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 21 November 2015

### **C. Bentuk Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto.**

Jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Binamu yang telah dipantau oleh Dinas Sosial ada 15 kepala rumah tangga yang melakukan tindak kekerasan yang tersebar di beberapa kelurahan yang memang mempunyai kasus kekerasan seperti Kelurahan Biringkassi, Kelurahan Pabiringa, Kelurahan Empoang, dan Kelurahan Panaikang. Ke empat kelurahan ini memang yang mempunyai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kecamatan Binamu. Yang baru dalam pantauan kami hanya 15 kepala rumah tangga tapi tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bertambah, karena banyak yang telah berkeluarga yang mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami tetapi tidak berani untuk meminta tolong atau melaporkan kepada pihak yang bersangkutan yang dimaksud seperti kepala lingkungan. Korban kekerasan yang tidak ingin meminta tolong dikarenakan mereka malu terhadap tetangga kalau korban telah mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Pembiaran seperti ini lah yang sulit di pantau oleh Dinas Sosial.

Jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri ada 15 yang tersebar dari beberapa kelurahan seperti kelurahan Biringkassi berjumlah 6 istri,

kelurahan Pabiringa berjumlah 4 istri, kelurahan Empoang berjumlah 3 istri dan Kelurahan Panaikang berjumlah 2 istri. Dari ke 15 jumlah korban ini yang telah masuk dalam pantauan Dinas Sosial.

Kekerasan fisik yang dialami oleh ke 15 korban yang telah di pantau oleh Dinas sosial Kabupaten Jeneponto kebanyakan kekerasakan fisik dan kekerasan lisan. Kekerasan fisik seperti yang sering dialami oleh sang istri yaitu pemukulan, penamparan dan penendangan kepada sang istri. bagian yang sering didapat oleh korban apabila suami memukul yaitu punggung korban yang sering mendapat pemukulan sedangkan bagian yang sering terkena tendangan yaitu bagian paha dan penamparan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dibagian pipi sampai-sampai gigi korban terlepas akibat tamparan sang suami, inilah kekerasan fisik yang dialami oleh korban.

Selain kekerasan fisik yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan lain yang sering dilakukan suami itu selain memukul dengan kekerasan lisan seperti perkataan kasar sang suami kepada istrinya. Bahkan kekerasan lisan inilah yang paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Contoh perkataan kasar yang sering dilontarkan kepada sang istri seperti dalam bahasa kasar Makassar apabila sang suami marah “kongkong, sundala,” (mohon maaf) inilah perkataan kasar suami yang sering dialami oleh sang istri apabila sang suami lagi marah.

Timbulnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Binamu dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, faktor budaya, perselingkuhan dan faktor istri yang kurang baik melayani suami. Seperti yang di ungkapkan oleh Drs. H. Daming, M.Si selaku kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial:

“kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Binamu itu karena ekonomi setiap kepala rumah tangga bervariasi dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari dimana sekarang tuntutan biaya hidup sangat tinggi sehingga membuat kepala rumah tangga berputar otak untuk mencari rejeki ditambah desakan sang istri yang membuat kepala rumah tangga menjadi marah sehingga sang suami memukul istrinya sendiri tapi ada juga suami yang selingkuh karena sang istri kurang memberikan pelayanan yang baik ini juga yang menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.”<sup>1</sup>

Selain faktor ekonomi dan kurang baiknya pelayanan istri kepada suami ada juga faktor lain seperti yang diungkapkan oleh Abdul Rasyid Akib, BSW (55 Tahun) mengungkapkan:

“Pertama faktor budaya juga yang menentukan karakter masyarakat Jeneponto khususnya di Kecamatan Binamu berdekatan dengan pantai sehingga iklim di sini cukup panas sehingga membuat karakter masyarakat Jeneponto Di Kecamatan Binamu itu sangat keras. Contoh kecil jika suami memanggil sang istri bukan menggunakan nada bahasa yang halus tapi menggunakan nada bahasa yang kasar seperti dalam bahasa Makassar latamaeko artinya mau pergi kemana tapi dengan menggunakan nada bahasa yang tinggi, inilah yang membuat karakter masyarakat menjadi keras karena hawa panasnya dan yang kedua faktor perselingkuhan maupun istri yang kurang melayani suaminya dengan baik inilah yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di Kecamatan Binamu.”<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara informan mengatakan terjadinya perselisihan dikeluarga disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor perselingkuhan yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi.

Kasus kekerasan yang terjadi di Kecamatan Binamu selama ini suami selalu memukul istri, dan setiap perlakuan kasar suami yang dialami oleh istri, sang korban hanya diam dan tinggal dirumah terus akibat malu oleh tetangga karena selalu mendapatkan perlakuan kasar dari suami. Jadi Dinas Sosial selama ini hanya melakukan sosialisai kepada setiap rumah dan belum mampu untuk melakukan pembinaan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Drs. H. Daming, M.Si, Kepala Dinas, wawancara. Jeneponto, 03 November 2015

<sup>2</sup> Abd Rasyid Akib,BSW, UPTD-LLK, wawancara. Jeneponto, 02 November 2015

Bentuk penanganan yang dilakukan selama ini oleh pegawai Dinas Sosial dalam menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kecamatan Binamu itu hanya sebatas bersosialisasi. Bersosialisasi yang dimaksud oleh pegawai Dinas Sosial yaitu melakukan atau memberikan pemahaman oleh setiap warga khususnya di Kecamatan Binamu tentang adanya Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, membuat masyarakat sadar akan adanya hukuman dan tidak melakukan kembali kekerasan terhadap istrinya.

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial hanya sampai 4 kelurahan dalam melakukan kegiatan bersosialisasi ini hal-hal yang dilakukan oleh setiap pegawai dinas sosial mendatangi beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Binamu yang memiliki potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang cukup banyak dari ke tiga belas kelurahan yang ada di Kecamatan Binamu. Kelurahan yang telah di datangi oleh pegawai Dinas Sosial antara lain Kelurahan Balang Toa, Kelurahan Pabiringa, Kelurahan Empoang, dan Kelurahan Panaikang.

Cara bersosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial dalam memberikan pemahaman tentang undang-undang dengan cara mendatangi beberapa rumah dalam setiap kelurahan yang memiliki potensi kekerasan dengan didampingi oleh kepala lingkungan yang memberikan pengarahan kepada pegawai Dinas Sosial yang menunjukkan setiap rumah yang mempunyai potensi kasus kekerasan.

Dalam melakukan sosialisasi ini pegawai Dinas Sosial membutuhkan waktu empat sampai lima hari dari setiap kelurahan. Dan pemahaman yang diberikan oleh pegawai Dinas Sosial dengan berbicara langsung kepada kepala rumah tangga dengan menjelaskan materi Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan jangan selalu melakukan kekerasan kepada istri bahwa setiap kekerasan memiliki hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Selama ini Dinas Sosial tidak pernah memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan belum juga memberikan fasilitas rehabilitasi di karenakan anggaran untuk program penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak ada.

Faktor yang membuat belum efektifnya penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kec Binamu, karena pihak Dinas Sosial masih terfokus dalam program penanganan kemiskinan sehingga program rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Sosial belum menjadi skala prioritas. Di satu sisi anggaran khusus untuk merehabilitasi korban yang mengalami tindak kekerasan tidak tersedia membuat pegawai Dinas Sosial selama ini hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat itupun baru beberapa kelurahan yang baru mendapatkan sosialisasi dari pegawai Dinas Sosial.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial belum mampu melakukan penanganan yang lebih mendalam kepada korban-korban tindak kekerasan dalam rumah tangga karena masih minimnya anggaran, sehingga hanya mampu melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan belum mampu melakukan pembinaan kepada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.



Kasus yang masuk di Dinas Sosial atau yang mempunyai anggaran yang cukup seperti kegiatan pendampingan terhadap Anak Bermasalah Dengan Hukum (ABH), Lanjut Usia (LANSIA), Anak Jalanan (ANJAL), Cacat Dan Tuna Susila, Fakir Miskin, Anak Terlantar. Pegawai dinas berharap agar kedepannya pemerintah pusat memberikan dana yang cukup untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga ini supaya tidak hanya selalu melakukan sosialisasi saja.

Selama ini yang terlibat dalam penanganan kekerasan rumah tangga di kec. Binamu ialah kepolisian, kepala lingkungan dan keluarga kedua pihak maka Pada umumnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kec. Binamu, korban langsung melaporkan ke pihak Polisi, karena masyarakat selama ini mengetahui bahwa jika terjadi permasalahan pemukulan atau tindak criminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka masyarakat langsung melaporkan ke pihak kepolisian.

Penanganan pihak kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menerima pengaduan dari korban untuk di tindak lanjutin tentang laporan si korban. Untuk melakukan koordinasi kepada pihak dinas yang melakukan penanganan terhadap korban, kepolisian belum melakukannya karena pihak kepolisian belum mendapat informasi tentang adanya dinas yang terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tugas aparat kelurahan seperti kepala lingkungan dalam menangani perselisihan suami istri yang terjadi kepala lingkungan memanggil kedua pihak yang berselisih untuk mendengarkan permasalahan yang terjadi setelah mendengarkan

permasalahan kepala lingkungan langsung menyarankan agar suami istri yang terlibat perselisihan bisa akur kembali.

***D. Kendala apa yang diHadapi oleh Pegawai Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga***

Menjalankan peran sebagai pelayanan masyarakat, tentunya ada beberapa hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi. Pelayanan masyarakat dalam menjalankan perannya tentunya menemukan kesulitan/kendala yang dapat menghalangi kelancaran suatu kegiatan yang tentunya sehubungan dengan pelayanan sosial.<sup>3</sup> Dalam menjalankan suatu perannya sebagai pelayanan masyarakat yang penyanggah masalah kesejahteraan sosial terdapat beberapa kendala seperti dikemukakan oleh pihak pegawai dinas sosial, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Rasyid Akib, BSW (55 Tahun):

“yang menjadi kendala selama ini di pegawai dinas sosial yang bermasalah dengan pelayanan kesejahteraan sosial adalah biaya anggaran dan sumber daya manusianya. Mempunyai bidang-bidang tertentu dengan tugas-tugas mereka masing-masing, jadi di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial harus membagi waktu antara tempat mereka bekerja, Tenaga kerja merupakan kendala karena mereka juga mempunyai kesibukan di bidang-bidang tempat mereka kerja, sehingga sosialisasi sangat kurang karena pegawai dinas sosial sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing.”<sup>4</sup>

Dalam menjalankan suatu program pelayanan selalu terhambat oleh sumber daya manusia sehingga dalam melaksanakan program sosialisai tentang Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga tidak berjalan lancar. Dan yang paling

---

<sup>3</sup>Wisnu Andrianto,dkk,”Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 No. 2 (2011): h.208

<sup>4</sup> Abd Rasyid Akib,BSW, UPTD-LLK, wawancara. Jenepono, 02 November 2015

penting dalam menjalankan program supaya dapat berjalan lancar terletak di anggaran apabila anggaran dalam setiap program tercukupi maka akan berjalan lancar pula. setiap instansi yang ingin menjalankan kegiatan akan membutuhkan anggaran karena sangat penting supaya dengan mudahnya terlaksana kegiatan PMKS.

Begitu pula yang diungkapkan oleh Drs. H. Daming, M.Si selaku kepala Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Sosial:

“program yang ada selama ini belum berjalan maksimal di karenakan anggaran yang menjadi kendala dan Sumber Daya Manusia, dalam sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak maksimal karena petugas yang kami kirim hanya 1 sampai 2 petugas dalam setiap kelurahan sehingga bersosialisasi pun memakan waktu sampai sehari-hari di karenakan setiap pegawai di lingkungan dinas ini lebih fokus ke program yang sudah memiliki anggaran yang cukup dan selama ini anggaran merupakan alat yang digunakan untuk memperlancar suatu kegiatan, apabila anggaran cukup maka kegiatan pun akan berjalan dengan lancar dan adapun anggaran yang kami butuhkan untuk masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 50 juta”<sup>5</sup>

Informasi diatas menunjukkan bahwa yang menjadi tidak maksimalnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai dinas sosial karena dalam menjalankan sosialisasi hanya 1 sampai 2 petugas yang dikirim dalam setiap kelurahan dan mendatangi setiap rumah untuk melakukan sosialisasi karena dinas tidak bisa mengerahkan terlalu banyak petugasnya dikarena para petugas lainnya sudah memiliki tugas masing-masing. Dan untuk kelancaran program sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Dinas sosial membutuhkan dana 50 juta.

Begitu juga yang diungkapkan oleh St. Arnida Nur, S.Sos pegawai bidang rehabilitasi sosial:

---

<sup>5</sup> Drs. H. Daming, M.Si, Kepala Dinas, *wawancara*. Jeneponto, 03 November 2015

“dalam menjalankan suatu program harus didukung oleh anggaran dan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan sosialisai tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam rumah Tangga kepada masyarakat di kecamatan Binamu ini belum maksimal seperti yang telah saya sampaikan bahwa belum maksimalnya karena anggaran yang terbatas dan sumber daya manusianya yang kurang karena teman-teman pegawai yang ada di lingkup dinas ini sibuk dengan program yang telah memiliki anggaran yang cukup sehingga untuk melakukan kegiatan sosialisasi hanya beberapa petugas saja yang di kirim untuk setiap kelurahan”<sup>6</sup>

Informan diatas menunjukkan bahwa tanpa adanya anggaran yang cukup dalam melaksanakan kegiatan dan sumber daya manusia yang kurang maka sebuah kegiatan atau program tidak akan berjalan dengan lancar karena anggaran merupakan alat yang digunakan untuk memperlancar suatu kegiatan, apabila anggaran cukup maka kegiatanpun dapat berjalan dengan lancar, dengan demikian harus adanya jaminan kepastian dan ketersediaan anggaran yang ideal sesuai kebutuhan.

Pemahaman tentang sebuah layanan akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Melayani adalah kesediaan seseorang memberikan jasa kepada orang lain. Kesediaan memberikan layanan haruslah muncul dari diri sendiri atau kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Layanan yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun sektor Kepolisian pada kenyataan masih mendapatkan kendala guna melakukan penahanan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini karena pada umumnya korban terlambat melapor meskipun telah dilakukan berulang kali oleh pelakunya, maka kepolisian membentuk satuan unit khususnya yang secara spesifik menangani masalah perempuan dan anak yang termasuk didalamnya kasus kejahatan

---

<sup>6</sup> St. Arnida Nur, S.Sos, Bidang Rehabilitasi Sosial, *wawancara* Jeneponto, 03 November 2015

kekerasan dalam rumah tangga yang bisa disebut dengan unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) dan pegawai dinas sosial tidak pernah mendampingi yang mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

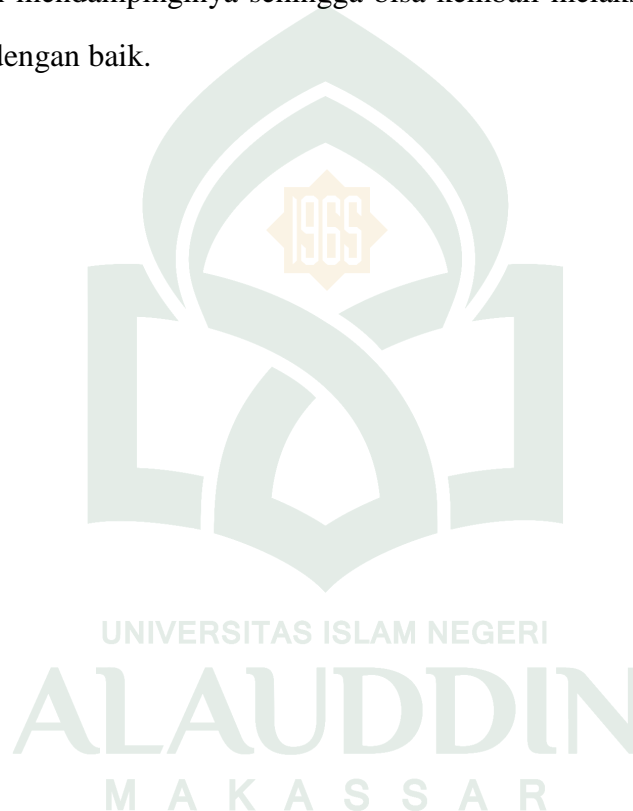
#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu sebatas bersosialisasi di masyarakat atau memberikan pemahaman edukasi tentang ancaman hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar suami tidak selalu memukuli istrinya.
2. Bentuk Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti a) kekerasan fisik yaitu pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. b) kekerasan nonfisik/psikis/emosional yaitu penghinaan, melaran istri bergaul, akan menceraikannya. c) kekerasan seksual yaitu memaksa istri menjadi wanita panggilan. d) kekerasan ekonomi yaitu tidak memberikan nafka kepada istrinya.
3. Kendala Yang di Hadapi oleh Pegawai Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu kurangnya anggaran yang dihadapinya karena merupakan hal yang paling utama sehingga program tetap terlaksana tpi sampai sekarang tidak bisa mengatasi program tentang masalah tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga karena hambatan di anggaran, sumber daya manusianya yang tidak memiliki tanggung jawab dengan tugasnya.

## **B. Implikasi Penelitian**

Pegawai dinas sosial merupakan tempat melaporkan setiap masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, tapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya maka masyarakat melaporkan kepolisi.

Seharusnya pegawai dinas sosial melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat yang ada di kabu<sup>67</sup> neponto agar mengetahui adanya pegawai PMKS yang akan mendampinginya sehingga bisa kembali melaksanakan tugas atau fungsi sosialnya dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi Buku

- Abdul Rahman , S.Ag., m.Pd *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*.Cet I;Alauddin UnuversityPress.2012
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro,2001
- Andrionto, Wisnu, dkk.,”Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 2 (2011): h. 203
- Bagong Suyanto dan Sutnah, *Metode Penelitian sosial*. Cet I; Jakarta;Kencana.2005
- Dirk Paselbessy, Jhon. “ Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya”, *Jurnal Ilmiah*, No. 3 (2010), h. 10.
- Dr.H. Asep Usman Ismail,MA. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Cet I;Tangerang:Lentera Hati Anggota IKAPI.2012
- Gebi Pradipta, Khinanty,” Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
- Kabupaten Jenepono Dalam Angka 2014, *Badan Statistik Pusat (BPS)* Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Jenepono Dalam Angka 2015 *Badan Statistik Pusat (BPS)* Provinsi Sulawesi Selatan
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung; Remaja Rosda Karya,1995
- Makarao, M. Taufik, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* cet, I; Jakarta: PT.Rineka Cipta,2013.
- Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H.*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.Cet. I;Jakarta:Sinar Grafika,2010.
- Nofarina,”Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana”,*Jurnal Ilmiah*,(2012): h.5.
- Nola Fitria, Sei “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), h. 6-7



- Proses Pensalehan Anak Dalam Keluarga Menurut Pendidikan Islam: Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2011
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 “Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”
- Setya ningsih, Nurlena,” Penanganan Tindak Kekersan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Ilmiah*, (2014): h. 9.
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. VII;Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabete, 2009
- Surjawati, Anisa,” Peran Perempuan Dalam Perekonomian Rumah Tangga Di Dusun Pantog Kulon, Banjarogo, Kali Bawang, Kulon Progo”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijago Yogyakarta, 2013
- William J. Goode. *Sosiologi Keluarga*.Cet. IV;Jakarta:Sinar Grafika Offset.1995.
- Yul, Andi. “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmiah*, 2013: h. 12-13
- Sarwono, Prof. Dr. Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Cet IX: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004

### B. Referensi online

Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamus.bahasaIndonesia.org/upaya>, (20 Juni 2015)

Lembaga bantuan hukum APIK Jakarta <http://www.lbh-apik.or.id/fact%20%20kdr%20dalam%20islam.htm> (Diakses 22 Agustus 2015)

[http://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi fungsi dan bentuk keluarga.html?m=1](http://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html?m=1) (Diakses 16 Oktober 2015)

<http://zulfaalfaruqy.blogspot.co.id/2015/02/psikologi-keluarga-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html?m=1> (diakses 13 Desember 2015)



## **RIWAYAT HIDUP**



### **DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Kasmianti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jeneponto, 28 Oktober 1993  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. A.P Pettarani IIIc  
Facebook : Khazmiati Zainuddin

### **DATA KELUARGA**

Ayah : Zainuddin  
Ibu : St. Aminah  
Anak Ke- : Empat dari Empat Bersaudara

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

2000-2005 : SDN 23 Pattontongan  
2005-2008 : SMP Negeri 1 Binamu  
2008-2011 : SMK Negeri 1 Jeneponto  
2011-2015 : Program Strata Satu (S1) PMI/Kesejahteraan sosial  
UIN Alauddin Makassar